

Lampiran 1 **Daftar Pertanyaan Model I**

MODEL I

A. DAFTAR PERTANYAAN

Nama :

Jenis Kelamin : Laki-laki , perempuan *

Usia : Tahun

Lama Bekerja : Tahun

Instansi / Bagian :

)*beri tanda centang salah satu

1. Partisipasi (*Participation*): Setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing

- a. Apa yang anda ketahui mengenai Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Prov. Jawa Tengah? Dibawah kepemimpinan siapakah sekarang?
- b. Apakah anda tahu dimana lokasi Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi ?
- c. Apakah yang anda ketahui mengenai kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi? Sebutkan!
- d. Apakah Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi pernah melibatkan anda atau instansi anda selaku *stakeholder* jasa konstruksi dalam kegiatannya ?
- e. Kegiatan apa yang anda butuhkan oleh instansi anda...
- f. Apabila pernah, dalam kegiatan apa, sebutkan :
 1.
 2.
 3.
 4.

- g. Kapan instansi anda bekerjasama dengan Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi
- h. Apakah kegiatan tersebut berjalan kontinyu ?
- i. Apakah kegiatan tersebut sesuai dengan aspirasi atau keinginan instansi/asosiasi anda?

2. Akuntabilitas (*Accountability*): Para pengambil keputusan dalam sektor publik, swasta dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik, sebagaimana halnya kepada stakeholders.

- a. Apakah selama anda tahu jumlah anggaran Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi? Lebih jauh lagi, apakah anda tahu berapa jumlah biaya yang dikeluarkan dalam setiap kegiatannya?
- b. Apakah anda tahu berapa jumlah anggaran yang dipertanggungjawabkan oleh Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi pada setiap akhir tahun anggaran ?

3. Aturan Hukum (*Rule of law*): Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak azasi manusia.

- a. Apakah yang anda ketahui mengenai aturan hukum atau perundang-undangan terkait jasa konstruksi? Sebutkan :
 - 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
- b. Aturan jasa konstruksi manakah yang terkait dengan Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi?
- c. Bagaimanakah peran Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi dalam peningkatan pengetahuan mengenai hukum atau perundang-undangan tersebut?
- d. Bagaimanakah peran Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi dalam menegakkan aturan hukum atau perundang-undangan terkait Jasa Konstruksi tersebut?

4. Transparansi (*Transparency*): Transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.

- Jenis Informasi jasa konstruksi apa yang anda/asosiasi/instansi butuhkan?
- Apakah informasi tersebut dapat anda dapatkan di Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi?
- Apabila iya, apakah mudah dalam mendapatkannya? melalui media apa? Sebutkan.....
- Apakah anda mengetahui informasi jadwal kegiatan (Bimbingan Teknis) yang ada di Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi?
- Bagaimana dengan akses untuk informasi anggaran dalam setiap kegiatan Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi?

5. Daya Tangkap (*Responsiveness*): Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

- a. Apakah institusi anda pernah berkonsultasi atau bekerjasama dengan Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi?
- b. Apakah pelayanan pada Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi sudah sesuai dengan keinginan anda?

6. Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*): Pemerintah yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

- a. Apakah Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi selalu muncul dalam setiap permasalahan Jasa Konstruksi?
- b. Apakah Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi dalam menjalankan perannya dapat menjadi jembatan penengah bagi anda / institusi anda?

7. **Berkeadilan** (*Equity*): Pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
- Apakah Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi membedakan gender dalam setiap kegiatan atau pelayanannya?
8. **Efektifitas dan Efisiensi** (*Effectifitas and Efficiency*): Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan berbagai sumber yang tersedia.
- Efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran?
 - Efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan tenaga kerja?
 - Efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan sarana dan prasarana?
9. **Visi Strategis** (*Strategic Vision*): Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintah yang baik dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.
- Apakah menurut anda Kepala Balai memiliki wawasan yang luas dan jangka panjang terkait dengan perencanaan kegiatan kedepan?
 - Adakah visi strategis terkait dengan instansi/lembaga yang berhubungan dengan Balai Jasa Konstruksi? Sebutkan:
10. Pertanyaan terakhir adakah hal-hal lainnya yang ingin disampaikan diluar pertanyaan ini ? sebutkan :
-
 -
 -
 -

Lampiran 2 **Daftar Pertanyaan Model II**

MODEL II

DAFTAR PERTANYAAN

Nama : _____

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan *

Usia : _____ Tahun

Lama Bekerja : _____ Tahun

Instansi / Bagian : _____

)*beri tanda centang salah

1. Partisipasi (*Participation*): *Setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.*

- a. Apa makna dan bentuk partisipasi penyelenggaraan jasa konstruksi menurut anda, bisa di jelaskan?
- b. Bagaimana instansi anda menyampaikan pendapat mengenai penyelenggaraan jasa konstruksi, melalui media apa, jelaskan?
- c. Menurut anda, siapa sajakah yang perlu dilibatkan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, sebutkan?
- d. Bagaimana seharusnya partisipasi *stakeholder* jasa konstruksi dalam pelaksanaan jasa konstruksi di Jawa Tengah, jelaskan?
- e. Partisipasi apa yang instansi anda ingin/bisalaksanakan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, sebutkan?
 1.
 2.
 3.

2. Akuntabilitas (Accountability): *Para pengambil keputusan dalam sektor publik, swasta dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik, sebagaimana halnya kepada stakeholders.*

- a. Apa makna akuntabilitas penyelenggaraan jasa konstruksi menurut anda, jelaskan?
- b. Menurut anda perlukah akuntabilitas dalam penyelenggaraan jasa konstruksi tersebut, jelaskan?
- c. Bila perlu, dalam bentuk media apa **Akuntabilitas** penyelenggaraan jasa konstruksi menurut anda, jelaskan?
- d. Bagaimana pelaksanaan **Akuntabilitas** penyelenggaraan Jasa Konstruksi saat ini?
- e. Apakah selamaini anda tahu jumlah anggaran Balai Jasa Konstruksi untuk penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi di Jawa Tengah ?
- f. Apakah selama ini anda tahu pertanggungjawaban penyelenggaraan jasa konstruksi oleh Balai Jasa Konstruksi?

3. Aturan Hukum (Rule of law): *Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak azasi manusia.*

- a. Menurut anda, cukupkah payung hukum dalam pelaksanaan jasa konstruksi, jelaskan?
- b. Bagaimanakah pelaksanaan **aturan hukum** pada jasa konstruksi di jawa tengah saat ini, jelaskan?
- c. Bagaimana penyelesaian hukum dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, melalui media apa, jelaskan?
- d. Bagaimana dengan peran Balai Jasa Konstruksi terkait **aturan hukum** saat ini, jelaskan?

4. Transparansi (Transparency): *Transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.*

- a. Perlukah **transparansi** dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi bagi instansi anda, jelaskan?
- b. Dalam hal apa dan bagaimana bentuknya, melalui media apa?
- c. Bagaimana pelaksanaan **transparansi** penyelenggaraan Jasa Konstruksi saat ini?

5. Daya Tangkap (Responsiveness): *Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders).*

- a. Jelaskan tantangan kedepan instansi anda?
- b. Bagaimana perlunya **daya tangkap** pemerintah terhadap instansi anda, jelaskan?
- c. Kenyataannya saat ini bagaimana?
- d. Menurut anda bagaimana solusinya?

6. **Berorientasi Konsensus** (*Consensus Orientation*): Pemerintah yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

- a. Pernahkah instansi diajak musyawarah oleh pemerintah terkait penyelenggaraan jasa konstruksi? Ceritakan!
- b. Bila pernah, sebutkan! 1., 2., 3. dst.
- c. Bagaimana perubahannya setelah musyawarah tersebut? Ceritakan!
- d. Apa yang anda lakukan setelah mengetahui hal tersebut?

7. **Berkeadilan** (*Equity*): Pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

- a. Menurut anda **berkeadilan** dalam penyelenggaraan jasa konstruksi itu dalam hal apa? Jelaskan!
- b. Bagaimana pelaksanaan **keadilan** penyelenggaraan Jasa Konstruksi saat ini? Jelaskan!
- c. Adakah kendala dalam menuntut **keadilan** atas penyelenggaraan Jasa Konstruksi? Jelaskan!
- d. Apakah menurut anda pelayanan penyelenggaraan jasa konstruksi oleh Balai Jasa Konstruksi sudah adil? Jelaskan!

8. **Efektifitas dan Efisiensi** (*Effectifitas and Efficiency*): Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan berbagai sumber yang tersedia.

- a. Sepengetahuan anda, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Jasa Konstruksi apakah sudah **efektif**? Ceritakan pengalaman anda!

- b. Sebutkan sarana dan prasarana Balai Jasa Konstruksi yang bisa diakses untuk kegiatan instansi anda?
- c. Apakah sarana dan prasarana tersebut memadai?
- d. Apakah anda mengetahui penghematan-penghematan (efisiensi) yang dilakukan oleh Balai Jasa Konstruksi? Ceritakan dan sebutkan!

9. **Visi Strategis** (*Strategic Vision*): Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintah yang baik dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

- a. Apa yang ada dibenak anda mengenai visi jasa konstruksi secara umum di Jawa Tengah kedepan? Coba jelaskan!
- b. Sepengetahuan anda, apakah pimpinan balai jasa konstruksi sesuai dengan visi menurut anda tersebut? Jelaskan!
- c. Adakah niat untuk menyampaikan dan menyamakan visi instansi anda dengan Balai Konstruksi?
- d. Menurut anda bagaimana visi penyelenggaraan Jasa Konstruksi saat ini? Ceritakanlah!

10. **Pertanyaan Tambahan** : *adakah hal-hal lainnya yang ingin disampaikan diluar pertanyaan ini ? Sebutkan!* :

- a.....Kendala/masalah
- b.....Kendala/masalah
- c.....Kendala/masalah
- d.Kendala/masalah

Lampiran 3 Hasil Wawancara Terhadap Masyarakat Intelektual 1

Hasil Wawancara Terhadap Masyarakat Intelektual

Narasumber : Ngudi Hari, ST, MT.
 Waktu : 20.00 WIB
 Tempat : Kediaman Bp. Ngudi Hari, ST, MT.
 Hasil wawancara :

Uraian

1. Partisipasi

- **Pertanyaan (P)** : Apakah Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi pernah melibatkan anda atau instansi anda selaku *stakeholder* jasa konstruksi dalam kegiatannya?

Jawaban (J) : saya pernah mengisi materi K3 kepada tukang-tukang, atau kenek untuk mendapatkan pengetahuan mengenai k3, juga narasumber pada kegiatan kuliah umum diisi dari Balai Jasa Konstruksi dalam tema mewujudkan sertifikasi (SKA) kepada mahasiswa. Namun, belum terwujud sampai sekarang dan justru kerjasama dibidang jurnal dan perpustakaan dari USM yang diwakili oleh Ibu Lila sebagai studi banding.

- **P** : Apakah kegiatan tersebut berjalan kontinyu?

J : sewaktu-waktu saja bila ada perlu

2. Akuntabilitas

- **P** : Apakah selama anda tahu jumlah anggaran Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi? Lebih jauh lagi, apakah anda tahu berapa jumlah biaya yang dikeluarkan dalam setiap kegiatannya?

J : Tidak mengetahui persis, tetapi kalau melihat dari sisi Balai Jakon mengadakan pelatihan-pelatihan gitu kami kira ya puluhan sampai ratusan juta.

3. Aturan Hukum

- **P** : Apakah yang anda ketahui mengenai aturan hukum atau perundang-undangan terkait jasa konstruksi? Sebutkan :

J : Aturannya itu bahwa setiap pekerja (konstruksi) diwajibkan bersertifikat, saya tidak mengetahui persis, tetapi ada semacam lelang atau K3

- **P** : Aturan jasa konstruksi manakah yang terkait dengan Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi?

J: kalau menurut saya secara penyampaian sudah cukup bagus, dari media massa, internet sudah cukup bagus

- **P** : Bagaimanakah peran Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi dalam peningkatan pengetahuan mengenai hukum atau perundang-undangan tersebut?

J: Menurut saya masih kurang, perlu peningkatan kerjasama, justru yang saya tahu malah dari luar malahan, seperti LPJK, tetapi kalau secara langsung ke instansi paling dari undangan kalau ada sosialisasi, seminar baru ke kampus, langsung ke dekan atau kajar.

- **P** : Bagaimanakah peran Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi dalam menegakkan aturan hukum atau perundang-undangan terkait Jasa Konstruksi tersebut?

J : sudah cukup baik, mengikuti peraturan yang sudah ada, semacam LPSE, sudah bagus lah.

4. Transparansi

- **P** : Jenis Informasi jasa konstruksi apa yang anda/asosiasi/instansi butuhkan?

J : Yang paling utama adalah informasi bagaimana meningkatkan pengetahuan mahasiswa dalam mendapatkan sertifikat, misalnya di balai jasa konstruksi ada ya... mohon disampaikan

- **P** : Apakah informasi tersebut dapat anda dapatkan di Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi?

J : Bimbingan teknis

- **P** : Apabila iya, apakah mudah dalam mendapatkannya? melalui media apa? Sebutkan.....

J : sampai saat ini informasi masih minim dan tahu kalau ada undangan saja, tetapi secara umum cenderung mahasiswa (jadwal kegiatan Balai Jasa Konstruksi) jarang tahu.

5. Daya Tangkap

- **P** : Apakah institusi anda pernah berkonsultasi atau bekerjasama dengan Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi?

J : kalau saat ini itu belum ada, Cuma satu kalau bisa kerjasama dalam mendapatkan sertifikat dalam bentuk subsidi sertifikat, kalau itu terwujud ya ... (tentu) sangat bagus

6. Berorientasi Konsensus

- **P** : Apakah Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi selalu muncul dalam setiap permasalahan Jasa Konstruksi? Sebutkan!

J : Belum, kita masih membutuhkan seminar-seminar mengenai tugas2, masalah-masalah jasa konstruksi itu harus banyak dikenalkan (pada mahasiswa) di kampus, bentuknya bisa kerjasama.

7. Berkeadilan

- **P :** Apakah Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi membedakan gender dalam setiap kegiatan atau pelayanannya?

J : Tidak pernah, semua sama

8. Efektifitas dan Efisiensi

- **P :** Efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran?

J :

- **P :** Efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan tenaga kerja?

J :

- **P :** Efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan sarana dan prasarana?

J : mobilnya (MTU) sering-sering saja ke kampus, mengadakan buku-buku terbaru

9. Visi Strategis

- **P :** Adakah visi strategis terkait dengan instansi/lembaga yang berhubungan dengan Balai Jasa Konstruksi? Sebutkan:

J : banyak itu kalau harapan-harapannya, salah satunya agar mahasiswa kami itu benar-benar siap pakai yaitu dengan (mengadakan) pelatihan-pelatihan yang berkesinambungan baik itu SKT, atau SKA untuk mahasiswa kami maupun pelatihan lainnya yang berkesinambungan setiap bulan, selain sebagai pengenalan balai jasa konstruksi secara langsung mahasiswa dapat mengenal dunia pekerjaan.

- **P :** Pertanyaan terakhir adakah hal-hal lainnya yang ingin disampaikan diluar pertanyaan ini? sebutkan!

J : Kedepannya untuk balai jasa konstruksi untuk peningkatan masyarakat, sosialisasinya lebih diperbanyak, terutama pelayanan untuk publik, kemudian dapat diwujudkan kerjasama sertifikasi ringan biaya yang lebih maksimal.

Catatan : Pada saat penelitian ini berlangsung (2019), telah dilaksanakan kegiatan pelatihan dan sertifikasi tenaga ahli yang melibatkan mahasiswa USM tingkat akhir sebagai peserta (80 orang/2 angkatan) dan beberapa dosen terlibat sebagai narasumber/trainer dalam sesi pelatihannya. Pelatihan ini dilaksanakan dan dibiayai oleh APBD Provinsi Jawa Tengah melalui Balai Jasa Konstruksi

Lampiran 4 Hasil Wawancara Terhadap Unsur Masyarakat Intelektual 2

Hasil Wawancara Terhadap Unsur Masyarakat Intelektual

Topik : Masyarakat Intelektual
 Narasumber : Ir. Widia Suseno
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Kantor Dinas PU Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
 Hasil wawancara :

Uraian

1. Partisipasi

- Pertanyaan (P) : Apa makna dan bentuk partisipasi penyelenggaraan jasa konstruksi menurut anda, bisa di jelaskan?

Jawaban (J) : ya kalau dari perguruan tinggi rencana kedepan kan kita mau menyelenggarakan PSPPI atau Program Studi Program Profesi Insinyur itu, sehingga nanti kedepannya itukan orang-orang yang berkecimpung dibidang konstruksi harus punya sertifikasi, dimana nanti ada pendidikan lagi yang arahnya ke praktek. Unika diberi mandat dari dikti untuk menyelenggarakan itu (PSPPI), jadi yang ditunjuk waktu ini (hanya) UNDIP dan UNIKA untuk (kota) Semarang ini. ... banyak praktek daripada kuliahnya. Bentuk partisipasi lainnya adalah bisa ikut memikirkan kondisi masyarakat disekitar Kota Semarang, kaitannya dengan pembangunan-pembangunan di pemerintahan kota maupun provinsi itu kan kita perlu apa ya istilahnya... survei dimasyarakat, kira-kira pembangunan inikan harus mengena ke masyarakat. Beberapa kali bapak Gubernur (Jawa Tengah) ke UNIKA, juga Bapak Walikota dalam rangka jajakan kira-kira UNIKA itu punya peran dan masukan-masukan apa ke pemerintahan.

2. Akuntabilitas

- P : Apa makna akuntabilitas penyelenggaraan jasa konstruksi menurut anda, jelaskan?

J : ya mestinya perlu ya pak... karena kan itu dana-dana dari masyarakat jugakan, mestinya apa yang sudah di keluarkan/dibiayai itu tentunya perlu ada pertanggungjawaban ke masyarakat juga.

- **P** : Bila perlu, dalam bentuk media apa Akuntabilitas penyelenggaraan jasa konstruksi menurut anda, jelaskan?

J : mestinya medianya ya perlu masukan-masukan dari masyarakat terutama dalam kaitannya kalau (seperti) di pemkot (Pemerintah Kota) kan sudah ada semacam Hello Hendi .. Telp Hendi itu kan media yang menerima masukan dari masyarakat juga, jadi masyarakat juga bisa tahu ada proyek ini, ternyata proyeknya banyak hambatan-hambatan, kemudian masyarakat bisa menyampaikan permasalahan itu, laporan-laporan kita, terus juga lewat koran tribun kan ada surat pembaca, dan masukan2 lain.

- **P** : Untuk masalah dana pembinaan jasa konstruksi kira2 perlu tidak diungkapkan kepada masyarakat?

J : ya seharusnya kalau itu dana bukan apa itu istilahnya dana khusus ya mestinya perlu juga ya yang dari masyarakat, seperti dana sisa anggaran... nggak tahu ya, kalo pemerintah sih seharusnya terbuka semua maksud saya.

- **P** : Seperti dana bintek di tempat kami?
- **J** : Perlu terbuka itu

3. Aturan Hukum (*Rule of law*):

- **P** : Bagaimana dengan peran Balai Jasa Konstruksi terkait **aturan hukum** saat ini, jelaskan?

J : saya tidak banyak tahu, setahu saya tidak paling banyak di pengadilan

4. Transparansi (*Transparency*):

- **P** : Perlukah **transparansi** dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi bagi instansi anda, jelaskan?

J : mestinya perlu, karena sekarang eranya sudah keterbukaan semua, kalau tertutup malah kita dicurigai

- **P** : Dalam hal apa dan bagaimana bentuknya, melalui media apa?

J : ya semestinya ya media-media dalam kaitan dengan proyek-proyek yang diadakan atau kegiatan yang akan diadakan, misalnya (didanai) dari sumber apa, jumlahnya, dan lainnya.

- **P** : Bagaimana pelaksanaan **transparansi** penyelenggaraan Jasa Konstruksi saat ini?

J : saya kurang perhatian kesitu, cuma sebatas undangan. Tapi kelihatannya banyak ya dana-dana yang dititipkan disitu untuk bisa digunakan oleh masyarakat, cuma detilnya saya tidak tahu.

5. **Daya Tangkap(Responsiveness):** *Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders).*

- **P** : Jelaskan tantangan kedepan instansi anda?

J : Karena sudah ada undang-undangnya dari pemerintah bahwa rencana kedepan semua orang yang terkait dengan jasa konstruksi harus punya sertifikat kemungkinan UNIKA ini akan didatangi banyak orang karena disemarang ini hanya ada dua perguruan tinggi yang menangani sertifikasi itu (SKA-PPI)

- **P** : Bagaimana dengan kondisi sekarang ?

J : Kalau sekarang juknisnya belum ada, dan mahasiswa saat ini belum tahu bahwa kedepannya dibutuhkan, belum banyak sosialisasi kepada mahasiswa.

6. **Berorientasi Konsensus**

- **P** : Pernahkah instansi diajak musyawarah oleh pemerintah terkait penyelenggaraan jasa konstruksi? Ceritakan!

J : Pernah, Forum Jasa Konstruksi Daerah.

7. **Berkeadilan (Equity):** Pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

- **P** : Menurut anda **berkeadilan** dalam penyelenggaraan jasa konstruksi itu dalam hal apa? Jelaskan!

J : Obyek daripada pembangunan untuk orang-orang yang mana harus dilihat siapa yang membutuhkan, jangan mengumpul disatu tempat. Belum ada pemerataan pembangunan selama ini, masih ada ketimpangan pembangunan antar wilayah (timur-barat).

8. **Efektifitas dan Efisiensi** (*Effectifitas and Efficiency*): Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan berbagai sumber yang tersedia.

• **P** : Sepengetahuan anda, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Jasa Konstruksi apakah sudah **efektif**? Ceritakan pengalaman anda!

J : melayani mengenai teknologi bahan-bahan bangunan, proses harga satuan dasar bahan bangunan, proses-proses lelang, saya kira itu ya

9. **Visi Strategis** (*Strategic Vision*): Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintah yang baik dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

• **P** : Apa yang ada dibenak anda mengenai visi jasa konstruksi secara umum di Jawa Tengah kedepan? Coba jelaskan!

J : kalau dari perguruan tinggi ya memberikan masukan-masukkan proses lelang seperti apa yang transparan, adil, karena selama ini perguruan tinggi selama ini banyak meneliti, seperti bangunan yg mengalami kegagalan teknis.

• **P** : Sepengetahuan anda, apakah pimpinan balai jasa konstruksi sesuai dengan visi menurut anda tersebut? Jelaskan!

J : Kantor balai Jasa konstruksi kan punya dana pengembangan, kalau memungkinkan dana penelitian dan pengembang juga bisa dikerjasamakan. Justru datang dari LPJK seperti ada acara yang dilakukan bersama, penelitian Rumpalis (Rumah Panggung Hidrolis),

• **P** : Adakah niat untuk menyampaikan dan menyamakan visi instansi anda dengan Balai Konstruksi?

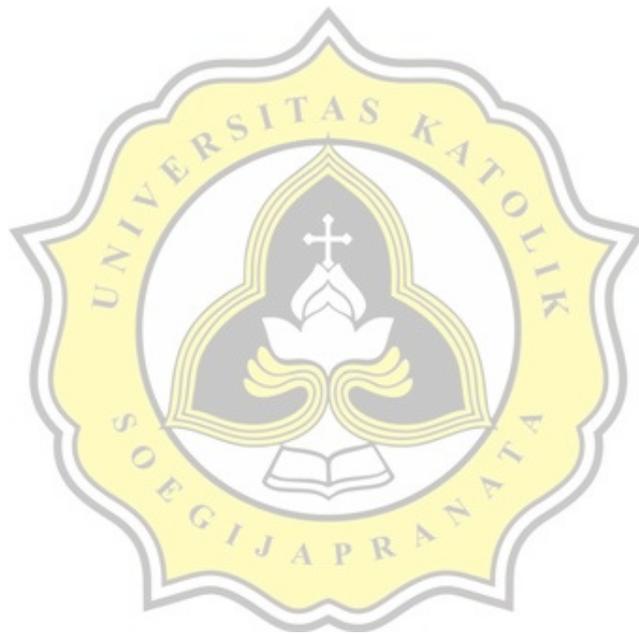
J : Ada, tentang penelitian dan pengembangan perguruan tinggi

• **P** : Menurut anda bagaimana visi penyelenggaraan Jasa Konstruksi saat ini? Ceritakanlah!

J : Sudah cukup baik

10. **Pertanyaan Tambahan** : *adakah hal-hal lainnya yang ingin disampaikan diluar pertanyaan ini ? Sebutkan!* :

- a. Kaitannya dengan mahasiswa yang memerlukan buku HSD, harapan saya ada harga khusus agar tidak memberatkan mahasiswa.
- b. Banyak kegiatan di Balai yang sifatnya kursus-kursus, namun tidak semua melibatkan/mengundang UNIKA.



Lampiran 5 Hasil Wawancara Terhadap Asosiasi Profesi

Hasil Wawancara Terhadap Asosiasi Profesi

Topik : Asosiasi Profesi
 Narasumber : Saesario Indrawan, ST.
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Kantor Balai Konstruksi
 Hasil wawancara :

Uraian

1. Partisipasi

- **Pertanyaan (P)** : Apakah Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi pernah melibatkan anda atau instansi anda selaku *stakeholder* jasa konstruksi dalam kegiatannya?

Jawaban (J) : Sering

- **P** : Kegiatan apa yang anda butuhkan oleh instansi anda. Apabila pernah, dalam kegiatan apa? sebutkan!

J : Kita membutuhkan dukungan kegiatan terutama berupa pelatihan K3 dan sertifikasi K3

- **P** : Apakah kegiatan tersebut berjalan kontinyu?

J : Bintel K3 Konstruksi dan Sertifikasi, serta dilibatkan dalam FJKD

- **P** : Kapan instansi anda bekerjasama dengan Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi?

J : Sudah lama, semenjak namanya BP2JK yang dipimpin oleh Bu Tri (Tri Wahyuningsih)

- **P** : Apakah kegiatan tersebut sesuai dengan aspirasi atau keinginan instansi/asosiasi anda?

J : Sudah Sesuai

2. Akuntabilitas

- **P** : Apakah selama anda tahu jumlah anggaran Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi? Lebih jauh lagi, apakah anda tahu berapa jumlah biaya yang dikeluarkan dalam setiap kegiatannya?

J : Secara total tahu, tetapi detail tidak, terutama kegiatan sertifikasi

- **P** : Apakah anda tahu berapa jumlah anggaran yang dipertanggungjawabkan oleh Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi pada setiap akhir tahun anggaran?

J : Kalau Perkegiatan tahu karena terlibat, hanya bintek

3. Aturan Hukum

- **P :** Apakah yang anda ketahui mengenai aturan hukum atau perundang-undangan terkait jasa konstruksi? Sebutkan :

J : UUK No. 2 Tahun 2017 itu jelas bahwa kita harus memajukan dunia konstruksi, kemudian terkait kami sebagai asosiasi K3 maka BJKIK sudah memenuhi Peraturan Menteri PU No. 5 tahun 2014 (5/PRT/M/2014) bahwa Pemerintah Provinsi juga mendukung sertifikasi tingkat ahli

- **P :** Aturan jasa konstruksi manakah yang terkait dengan Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi?

J: Sementara tidak ada

- **P :** Bagaimanakah peran Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi dalam peningkatan pengetahuan mengenai hukum atau perundang-undangan tersebut?

J: Ada, pasti bahwa setiap kegiatan bintek ada topik peraturan perundang-undangan K3 dari rekan-rekan BJKIK.

- **P :** Bagaimanakah peran Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi dalam menegakkan aturan hukum atau perundang-undangan terkait Jasa Konstruksi tersebut?

J : saya pikir penegakan hukum bukanlah ranah Balai Jasa Konstruksi, karena ranahnya hanya sosialisasi perundang-undangan. Kalau penegakan hukum tentunya tupoksi dinas teknis, (misal) kalau untuk urusan jalan ada sesuatu itu kan ya seharusnya urusannya Bina Marga, gedung ambruk ya (urusan) Cipta Karya.

4. Transparansi

- **P :** Jenis Informasi jasa konstruksi apa yang anda/asosiasi/instansi butuhkan?

J: Kalau kami jelas, membutuhkan peraturan-peraturan teknis, kemudian sosialisasi perundang-undangan seperti itu.

- **P :** Apakah informasi tersebut dapat anda dapatkan di Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi?

J : Ada

- **P :** Apabila iya, apakah mudah dalam mendapatkannya?melalui media apa? Sebutkan.....

J : Kalau saat ini dalam bentuk buku, itu mudah. Tinggal datang dan dapet (dari Balai Jasa Konstruksi)

- **P** : Apakah anda mengetahui informasi jadwal kegiatan (Bimbingan Teknis) yang ada di Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi?

J : Tahu, biasanya dapat email

5. Daya Tangkap

- **P** : Apakah institusi anda pernah berkonsultasi atau bekerjasama dengan Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi?

J : Pernah, dalam hal sosialisasi K3

- **P** : Apakah pelayanan pada Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi sudah sesuai dengan keinginan anda?

J : Sudah

6. Berorientasi Konsensus

- **P** : Apakah Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi selalu muncul dalam setiap permasalahan Jasa Konstruksi?

J : Belum, masih banyak sosialisasi teknis yang belum dilakukan, hanya kulitnya saja seperti FJKD. Yang kami harapkan seperti bintek pembuatan (mendirikan) *scaffolding*, atau teknik yang berhubungan dengan K3 seperti evakuasi, penanggulangan kebakaran, itu seharusnya yang perlu dilaksanakan.

- **P** : Apakah Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi dalam menjalankan perannya dapat menjadi jembatan penengah bagi anda / institusi anda? Bisa disebutkan!

J : Sementara belum, misalnya kan saat ini berlaku tiga sertifikat K3, (yakni) dari BNSP, LPJK, dan dari Kementerian Naker (Tenaga Kerja), nah ini masih rancu dikalangan pengguna jasa, mana yang dipakai, dan sudah kami bawa ke Forum FJKD, tapi memang belum ada tindak lanjut. Juga fasilitasi dari balai tetapi *outcome*-nya belum ada

7. Berkeadilan

- **P** : Apakah Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi membedakan gender dalam setiap kegiatan atau pelayanannya?

J : Dalam berbagai kegiatan yang kami laksanakan bersama Balai Jasa Konstruksi malah sering banyak yang perempuan.

8. Efektifitas dan Efisiensi

- **P** : Efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran?
J : Saya menilai pada kegiatan yang kami lakukan bersama dengan Balai Jasa Konstruksi, bahwa ternyata setelah kami ukur, sebelum bintek pengetahuna soal K3 itu rata-rata masih dibawah 50 % dari materi yang ada di SKKNI, ternyata setelah mengikuti bintek rata-rata mencapai 70-75 %, berarti menurut saya efektif, secara dana juga tidak berlebih dan tidak kurang jadi sangat efektif.
- **P** : Efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan tenaga kerja?
J : Menurut saya sudah pas
- **P** : Efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan sarana dan prasarana?
J : Lha mungkin itu yang harus dilengkapi.

9. Visi Strategis

- **P** : Apakah menurut anda Kepala Balai memiliki wawasan yang luas dan jangka panjang terkait dengan perencanaan kegiatan kedepan?
J : Menurut saya sudah memiliki
- **P** : Adakah visi strategis terkait dengan instansi/lembaga yang berhubungan dengan Balai Jasa Konstruksi? Sebutkan:
J : Visi strategisnya adalah bahwa kami selaku asosiasi profesi ingin memberikan pelatihan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat, dan itu sudah diakomodasi oleh Balai Jasa Konstruksi bersama jajarannya sekarang
- **P** : Pertanyaan terakhir adakah hal-hal lainnya yang ingin disampaikan diluar pertanyaan ini? sebutkan!
J : Menurut saya memang selaku instansi yang bertugas memberikan pemahaman tentang jasa konstruksi, mungkin perlu juga diadakan MOU dengan asosiasi profesi terutama, kemudian penyebaran informasi yang lebih luas melalui website, facebook, dll. Terkait informasi kegiatan yang selama ini hanya melalui email, andaikata itu bisa... Balai Jasa Konstruksi punya web sendiri, tentu kan akan lebih mudah dalam menyebarkan informasinya, baik itu kegiatan maupun hal-hal yang sifatnya sosialisasi. Saya pikir dua hal itu yang harus dilakukan.

Catatan : Pada saat penelitian ini berlangsung (2019), Balai Jasa Konstruksi telah melaksanakan A2K4 sebagai pemateri dan melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta sebagai peserta. Namun keluhan/permasalahan perihal kewenangan sertifikasi tenaga kerja dari disnaker dan dinas pekerjaan umum belum

Lampiran 6 Hasil Wawancara Terhadap Asosiasi Profesi 2

Hasil Wawancara Terhadap Asosiasi Profesi

Topik : Asosiasi Profesi
 Narasumber : Rayyan Malik, ST. MT.
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Kantor Konsultan
 Hasil wawancara :

Uraian

1. Partisipasi

- **Pertanyaan (P)** : Apakah Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi pernah melibatkan anda atau instansi anda selaku *stakeholder* jasa konstruksi dalam kegiatannya?
Jawaban (J) : Saya mengetahui kepemimpinan setingkat Dinas maupun kepemimpinan setingkat kepala balai
- **P** : Kegiatan apa yang anda butuhkan oleh instansi anda. Apabila pernah, dalam kegiatan apa? sebutkan
J : Saya mengetahui dan saya sering berkunjung kekantor balai tersebut dengan agenda koordinasi terkait pelatihan profesi dan survey hargasatua bangunan untuk kabupaten/kota se -Jawa Tengah
- **P** : Kegiatan apa yang anda butuhkan oleh instansi anda. Apabila pernah, dalam kegiatan apa? sebutkan!
J : Pernah, dalam kegiatan pelatihan profesi. Pelatihan profesi skala muda dan madya serta pelatihan tematik seperti, zonasi, pesisir dan tata ruang
- **P** : Apakah kegiatan tersebut berjalan kontinyu?
J : Berharap kontinyu dan konsisten setiap tahunnya, meskipun sekarang masih belum bisa dilaksanakan setiap tahun
- **P** : Kapan instansi anda bekerjasama dengan Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi?
J : Sejak tahun 2014
- **P** : Apakah kegiatan tersebut sesuai dengan aspirasi atau keinginan instansi/asosiasi anda?

J : Sudah sesuai untuk pelatihan sertifikasi ahli muda dan madya, namun belum sesuai untuk yang tematik (seperti zonasi, pesisir dan tata ruang, dll)

2. Akutanbilitas

• **P** : Apakah selama anda tahu jumlah anggaran Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi? Lebih jauh lagi, apakah anda tahu berapa jumlah biaya yang dikeluarkan dalam setiap kegiatannya?

J : Saya tidak mengetahui

• **P** : Apakah anda tahu berapa jumlah anggaran yang dipertanggungjawabkan oleh Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi pada setiap akhir tahun anggaran?

J : Saya tidak mengetahui

3. AturanHukum

• **P** : Apakah yang anda ketahui mengenai aturan hukum atau perundang-undangan terkait jasa konstruksi? Sebutkan :

J : Undang-Undang Jasa Konstruksi, Undang – Undang Aristektur

• **P** : Aturan jasa konstruksi manakah yang terkait dengan Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi?

J : Undang-Undang Jasa Konstruksi

• **P** : Bagaimanakah peran Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi dalam peningkatan pengetahuan mengenai hukum atau perundang-undangan tersebut?

J : Peran Balai Jakon belum optimal untuk peningkatan pengetahuan hukum.

• **P** : Bagaimanakah peran Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi dalam menegakkan aturan hukum atau perundang-undangan terkait Jasa Konstruksi tersebut?

J : Cukup berperan dalam konteks sosialisasi.

4. Transparansi

• **P** : Jenis Informasi jasa konstruksi apa yang anda/asosiasi/instansi butuhkan?

J : Jadwal kalender pelatihan untuk profesi setingkat muda dan madya serta pelatihan tematik

• **P** : Apakah informasi tersebut dapat anda dapatkan di Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi?

J : Belum kami dapatkan

- **P** : Apabila iya, apakah mudah dalam mendapatkannya? melalui media apa? Sebutkan....

J : -

- **P** : Apakah anda mengetahui informasi jadwal kegiatan (Bimbingan Teknis) yang ada di Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi?

J : Kami tidak mendapatkan informasi baik dengan website maupun papan pengumuman

5. Daya Tangkap

- **P** : Apakah institusi anda pernah berkonsultasi atau bekerjasama dengan Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi?

J : Pernah

- **P** : Apakah pelayanan pada Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi sudah sesuai dengan keinginan anda?

J : Cukup sesuai meskipun masih perlu ada perbaikan-perbaikan

6. Berorientasi Konsesus

- **P** : Apakah Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi selalu muncul dalam setiap permasalahan Jasa Konstruksi?

J : Ya.

- **P** : Apakah Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi dalam menjalankan perannya dapat menjadi jembatan penengah bagi anda / institusi anda? Bisa disebutkan!

J : Ya.

7. Berkeadilan....

- **P** : Apakah Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi membedakan gender dalam setiap kegiatan atau pelayanannya?

J : Tidak

8. Efektifitas dan efisiensi

- **P** : Efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran?

J : Cukup efektif dan efisien.

- **P** : Efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan tenaga kerja?

J : Cukup efektif dan efisien

- **P** : Efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan sarana dan prasarana?

J : Cukup efektif dan efisien.

9. VisiStrategis

- **P** : Apakah menurut anda Kepala Balai memiliki wawasan yang luas dan jangka panjang terkait dengan perencanaan kegiatan kedepan?

J : Cukup mumpuni.

- **P** : Adakah visi strategis terkait dengan instansi/lembaga yang berhubungan dengan Balai Jasa Konstruksi? Sebutkan:

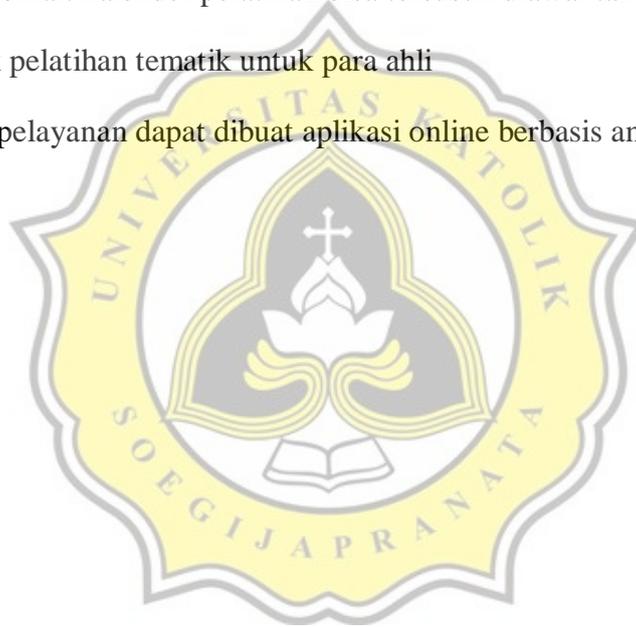
J : --

- **P** : Pertanyaan terakhir adakah hal-hal lainnya yang ingin disampaikan diluar pertanyaan ini? sebutkan!

J : a. Publikasi terkait kalender pelatihan bisa tersusun diawal tahun dan di publish

b. Perbanyak pelatihan tematik untuk para ahli

c. Informasi pelayanan dapat dibuat aplikasi online berbasis android



Lampiran 7 Hasil Wawancara Terhadap Asosiasi Perusahaan

Hasil Wawancara Terhadap Asosiasi Perusahaan

Topik : Asosiasi Perusahaan
 Narasumber : Ahmad Riyadi
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Kantor Gapkaindo
 Hasil wawancara :

Uraian

1. Partisipasi

- **Pertanyaan (P)** : Apa yang anda ketahui mengenai Balai Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Prov. Jawa Tengah? Dibawah kepemimpinan siapakah sekarang?
Jawaban (J) : Unsur pemerintah yang bertanggung jawab atas pembinaan jasa konstruksi, saya tidak tahu dibawah kepemimpinan siapa sekarang ini.
- **P** : Apakah Balai Jasa Konstruksi pernah melibatkan anda atau instansi anda selaku *stakeholder* jasa konstruksi dalam kegiatannya ?
J : Belum
- **P** : Apabila dilibatkan, dalam kegiatan apa asosiasi anda dapat berpartisipasi :
J : Pembinaan kepada anggota kami; terutama dalam hal manajemen konstruksi (bimbingan teknis), dan peningkatan kompetensi secara teori dan praktek terhadap tenaga ahli dan terampil supaya lebih profesional, mungkin Balai bisa menggandeng LPJK Jawa Tengah dalam hal tersebut.

2. Akuntabilitas

- **P** : Apakah selama anda tahu jumlah anggaran Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi? Lebih jauh lagi, apakah anda tahu berapa jumlah biaya yang dikeluarkan dalam setiap kegiatannya?
J : Tidak
- **P** : Apakah anda tahu berapa jumlah anggaran yang dipertanggungjawabkan oleh Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi pada setiap akhir tahun anggaran ?

J : Kalau sampai kedalam (an) itu tidak pak, tapi (kami ingin tahu) programnya (Balai) yang kita bisa ikut.

3. Aturan Hukum (*Rule of law*)

• **P** : Apakah yang anda ketahui mengenai aturan hukum atau perundang-undangan terkait jasa konstruksi? Sebutkan :

J : UU No. 2 Tahun 2017, lainnya lupa

• **P** : Bagaimanakah peran Balai Jasa Konstruksi dalam peningkatan pengetahuan mengenai hukum atau perundang-undangan tersebut?

J : Masih kurang, maksudnya bila terjadi masalah dengan anggota, sepertinya kita tidak ada tempat *gandulan* (menggantungkan/pegangan), selama ini diselesaikan sendiri-sendiri dan selama ini yang disalahkan tetap jasa konstruksinya, walaupun kesalahan ada dipihak pemberi pekerjaan (penyedia jasa). Jadi seharusnya ada pembinaan hukum. Kemudian banyak terdapat beda pandang antara aparat penegak hukum dengan penyedia jasa, seperti acuan dalam pekerjaan pemasangan tegel/keramik antara kejaksaan yang beracuan pada as, sedangkan penyedia beracuan pada bibir keramik. Mungkin Balai Jasa Konstruksi bisa mengadakan bimbingan teknis yang mendatangkan pakar yang ahli dalam bidang konstruksi (teknis bangunan), maupun Kejaksaan dan Kepolisian.

4. Transparansi (*Transparency*)

• **P** : Jenis Informasi jasa konstruksi apa yang anda/asosiasi/instansi butuhkan?

J : Kalau dari saya itu ya... program-program yang ada di Balai Jasa konstruksi, seperti pembinaan baik dalam bentuk pelatihan, atau mungkin ada semacam dana bantuan yang digunakan untuk kegiatan sertifikasi (subsidi SKT atau SKA), kemudian selama ini (dirasakan) informasi itu lamban sampai ke kami, mungkin karena rantainya terlalu panjang karena harus melewati LPJK, disini Balai Jasa Konstruksi harus punya kontak dan menghubungi langsung.

• **P** : Apakah informasi tersebut dapat anda dapatkan di Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi?

J : Jarang secara langsung, melewati LPJK

• **P** : Apabila iya, apakah mudah dalam mendapatkannya? melalui media apa? Sebutkan.....

J : Email

- **P** : Apakah anda mengetahui informasi jadwal kegiatan (Bimbingan Teknis) yang ada di Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi?

J : Tidak

5. **Daya Tangkap** (*Responsiveness*): Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

- **P** : Apakah institusi anda pernah berkonsultasi atau bekerjasama dengan Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi?

J : belum

- **P** : Apakah pelayanan pada Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi sudah sesuai dengan keinginan anda?

J : Apabila ada suatu aturan yang baru, bagaimana bersama kita mensikapi seperti ini belum pernah untuk dicarikan solusi dari Balai Jasa Konstruksi, seperti contohnya, dalam UU nantinya sertifikasi dilaksanakan oleh LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) tidak pernah ada antisipasi arahnya kedepan bagaimana di Jawa Tengah.

6. **Berorientasi Konsensus** (*Consensus Orientation*): Pemerintah yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

- **P** : Apakah Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi selalu muncul dalam setiap permasalahan Jasa Konstruksi?

J : Belum, seperti diungkap diatas Balai Belum bisa menjadi penengah dalam menghadapi permasalahan maupaun perubahan aturan.

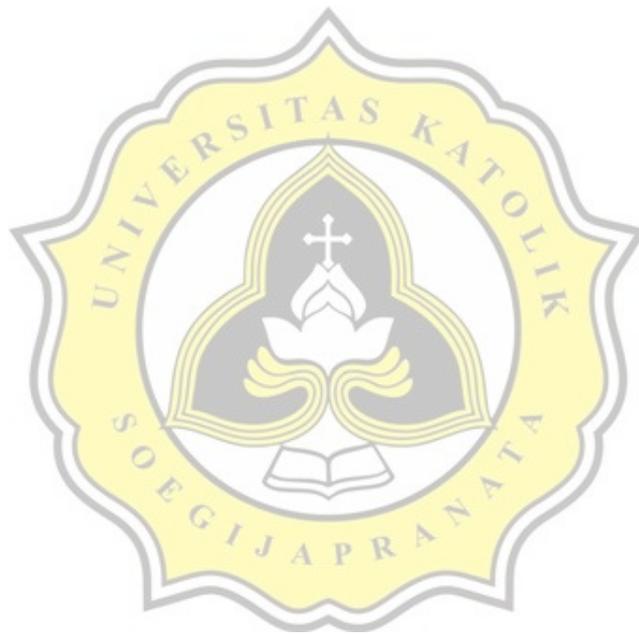
- **P** : Apakah Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi dalam menjalankan perannya dapat menjadi jembatan penengah bagi anda / institusi anda?

J : Belum

7. **Berkeadilan**

- **P** : Apakah Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi membedakan gender dalam setiap kegiatan atau pelayanannya?
 - J** : Berkeadilan dalam sisi lain, dalam hal ini disampaikan ketua GAPKAINDO, untuk saat ini Balai sudah merangkul asosiasi (dalam kegiatannya), hanya saja kurang merata pelibatan asosiasi yang banya di Jawa Tengah dimana hal ini dirasa kurang berkeadilan,bersifat kontinyu namun pada asosisasi itu-itu saja
8. **Efektifitas dan Efisiensi** (*Effectifitas and Effeciency*): Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan berbagai sumber yang tersedia.
- **P** : Efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran?
 - **P** : Efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan tenaga kerja?
 - **P** : Efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan sarana dan prasarana?
9. **Visi Strategis** (*Strategic Vision*): Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintah yang baik dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.
- **P** : Apakah menurut anda Kepala Balai memiliki wawasan yang luas dan jangka panjang terkait dengan perencanaan kegiatan kedepan?
 - J** : Tidak
 - **P** : Adakah visi strategis terkait dengan instansi/lembaga yang berhubungan dengan Balai Jasa Konstruksi? Sebutkan:
 - J** : Ada banyak, terutama menyangkut pembinaan anggota
10. Pertanyaan terakhir adakah hal-hal lainnya yang ingin disampaikan diluar pertanyaan ini ? sebutkan :
- a. Balai Jasa konstruksi diharapkan banyak menjalin komunikasi dengan asosiasi-asosiasi, supaya kami dapat tahu kebijakan pemerintah
 - b. LPJK sudah bagus pembinaannya akan tetapi tergantung juga kepada pemerintah, namun terbatas anggaran. Sehingga kebanyakan pendanaan swadaya asosiasi.
 - c. Saya rasakan pembinaan hanya sampai pada pengurus asosiasi, belum sampai pada anggota

- d. Pemerintah mensyaratkan sertifikasi untuk tenaga kerja konstruksi, namun sertifikasi yang dilaksanakan banyak yang hanya mengejar kuantitas, bahkan prosesnya berjalan tidak sesuai dengan aturan, seperti syarat tenaga kerja untuk mendapat sertifikat harus mengikuti pelatihan dan asesmen dahulu namun tidak dilakukan. Proses sertifikasi yang memakan waktu lama (maks. 3) hari, dimana diluar jawa bisa sehari jadi. Disini saya menuntut ketegasan pemerintah kepada LPJK



Lampiran 8 Hasil Wawancara Terhadap Unsur Pemerintah

Hasil Wawancara Terhadap Unsur Pemerintah

Topik : Unsur Pemerintah
 Narasumber : Syurya Deta S.
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Kantor Dinas PU Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
 Hasil wawancara :

Uraian

1. Partisipasi

- **Pertanyaan (P)** : Apa makna dan bentuk partisipasi penyelenggaraan jasa konstruksi menurut anda, bisa di jelaskan?
Jawaban (J) : Keikutsertaan dalam pelaksanaan kegiatan jasa konstruksi, membagikan peran sesuai dengan tupoksi dalam hal pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan
- **P** : Bagaimana instansi anda menyampaikan pendapat mengenai penyelenggaraan jasa konstruksi, melalui media apa, jelaskan?
J : Adanya forum : yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi (FJKD), Rakor TPJK di Kab. /Kota dan kegiatan Musyawarah Daerah (Musda) / Rakor Asosiasi
- **P** : Menurut anda, siapa sajakah yang perlu dilibatkan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, sebutkan?
J : - unsur TPJK Prov./ Kab./Kota
 - unsur asosisasi Badan Usaha
 - unsur asosiasi Profesi
 - akademisi
 - masyarakat perbankan
- **P** : Bagaimana seharusnya partisipasi *stakeholder* jasa konstruksi dalam pelaksanaan jasa konstruksi di Jawa Tengah, jelaskan?
J : Harus lebih bisa berperan
- **P** : Partisipasi apa yang instansi anda ingin/bisa laksanakan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, sebutkan?

- J** : 1. Penguatan kapasitas lembaga TPJK
 2. Penyelenggaraan sosialisasi peraturan-peraturan terkait jasa konstruksi
 3. Peningkatan kapasitas para pelaku jasa konstruksi (penyelenggaraan bintek-bintek terkait dengan jasa konstruksi)

2. Akuntabilitas

- **P** : Apa makna akuntabilitas penyelenggaraan jasa konstruksi menurut anda, jelaskan?
J : Dapat dipertanggungjawabkan kegiatannya apakah berhasil atau tidak sesuai ketentuan dan dilaporkan kepada publik
- **P** : Menurut anda perlukah akuntabilitas dalam penyelenggaraan jasa konstruksi tersebut, jelaskan?
J : Perlu, agar ada informasi yang dapat diberikan tentang penyelenggaraan jasa konstruksi
- **P** : Bila perlu, dalam bentuk media apa Akuntabilitas penyelenggaraan jasa konstruksi menurut anda, jelaskan?
J : Online / laporan kepada masyarakat di media
- **P** : Bagaimana pelaksanaan **Akuntabilitas** penyelenggaraan Jasa Konstruksi saat ini?
J : Baik
- **P** : Apakah selama ini anda tahu jumlah anggaran Balai Jasa Konstruksi untuk penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi di Jawa Tengah ?
J : Ya
- **P** : Apakah selama ini anda tahu pertanggungjawaban penyelenggaraan jasa konstruksi oleh Balai Jasa Konstruksi?
J : Ya

3. Aturan Hukum (*Rule of law*):

- **P** : Menurut anda, cukupkah payung hukum dalam pelaksanaan jasa konstruksi, jelaskan?
J : Perlu peningkatan dengan adanya aturan-aturan di daerah
- **P** : Bagaimanakah pelaksanaan **aturan hukum** pada jasa konstruksi di Jawa Tengah saat ini, jelaskan?
J : Perlu ada turunan aturan
- **P** : Bagaimana penyelesaian hukum dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, melalui media apa, jelaskan?

J : Pengadilan, arbitrase

- **P** : Bagaimana dengan peran Balai Jasa Konstruksi terkait **aturan hukum** saat ini, jelaskan?

J : Memberikan sosialisasi-sosialisasi aturan terkait jasa konstruksi

4. **Transparansi (Transparency):**

- **P** : Perlukah **transparansi** dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi bagi instansi anda, jelaskan?

J : Perlu, sesuai dengan era keterbukan

- **P** : Dalam hal apa dan bagaimana bentuknya, melalui media apa?

J : Dalam hal pembinaan, pelaksanaan pemilihan penyedia melalui online, dll

- **P** : Bagaimana pelaksanaan **transparansi** penyelenggaraan Jasa Konstruksi saat ini?

J : Sudah semakin baik

5. **Daya Tangkap (Responsiveness):** *Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders).*

- **P** : Jelaskan tantangan kedepan instansi anda?

J : Pemberdayaan tenaga konstruksi, serbuan tenaga kerja asing, dan (permasalahan K3)

- **P** : Bagaimana perlunya **daya tangkap** pemerintah terhadap instansi anda, jelaskan?

J : Sebagai fungsi pembinaan dalam hal pengaturan perlu ada peningkatan lagi

- **P** : Kenyataannya saat ini bagaimana?

J : Masih belum baik

- **P** : Menurut anda bagaimana solusinya?

J : Ada peningkatan, harus lebih responsif dalam menangkap isu-isu strategis bidang jasa konstruksi

6. **Berorientasi Konsensus**

- **P** : Pernahkah instansi diajak musyawarah oleh pemerintah terkait penyelenggaraan jasa konstruksi? Ceritakan!

J : Adaya Forum Jasa Konstruksi Daerah; Rakor TPJK Kab./Kota

- **P** : Bagaimana perubahannya setelah musyawarah tersebut? Ceritakan!
- **J** : Pemerintah kab./Kota semakin intens untuk penyelenggaraan SKT.
- **P** : Apa yang anda lakukan setelah mengetahui hal tersebut?
- **J** : Konsolidasi dengan Kota/Kab.

7. **Berkeadilan** (*Equity*): Pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

- **P** : Menurut anda **berkeadilan** dalam penyelenggaraan jasa konstruksi itu dalam hal apa? Jelaskan!
- **J** : Kesempatan keikutsertaan dalam kegiatan jakon
- **P** : Bagaimana pelaksanaan **keadilan** penyelenggaraan Jasa Konstruksi saat ini? Jelaskan
- **J** : Sudah cukup baik
- **P** : Adakah kendala dalam menuntut **keadilan** atas penyelenggaraan Jasa Konstruksi? Jelaskan!
- **J** : Jika ada konflik kepentingan
- **P** : Apakah menurut anda pelayanan penyelenggaraan jasa konstruksi oleh Balai Jasa Konstruksi sudah adil? Jelaskan!
- **J** : Sudah, melibatkan asosiasi, akademisi dll.

8. **Efektifitas dan Efisiensi** (*Effectifitas and Efficiency*): Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan berbagai sumber yang tersedia.

- **P** : Sepengetahuan anda, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Jasa Konstruksi apakah sudah **efektif**? Ceritakan pengalaman anda!
- **J** : Efektif, pelatihan SKA bagi fresh graduate, bintek bagi badan usaha
- **P** : Sebutkan sarana dan prasarana Balai Jasa Konstruksi yang bisa diakses untuk kegiatan instansi anda?
- **J** : Ruang pelatihan
- **P** : Apakah sarana dan prasarana tersebut memadai?
- **J** : cukup

- **P** : Apakah anda mengetahui penghematan-penghematan (efisiensi) yang dilakukan oleh Balai Jasa Konstruksi? Ceritakan dan sebutkan!

J : Tidak

9. **Visi Strategis** (*Strategic Vision*): Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintah yang baik dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

- **P** : Apa yang ada dibenak anda mengenai visi jasa konstruksi secara umum di Jawa Tengah kedepan? Coba jelaskan!

J : Semakin maju dann bermanfaat untuk masyarakat umum

- **P** : Sepengetahuan anda, apakah pimpinan balai jasa konstruksi sesuai dengan visi menurut anda tersebut? Jelaskan!

J : Sudah, dengan didukung semua staf akan dapat meraih visi

- **P** : Adakah niat untuk menyampaikan dan menyamakan visi instansi anda dengan Balai Konstruksi?

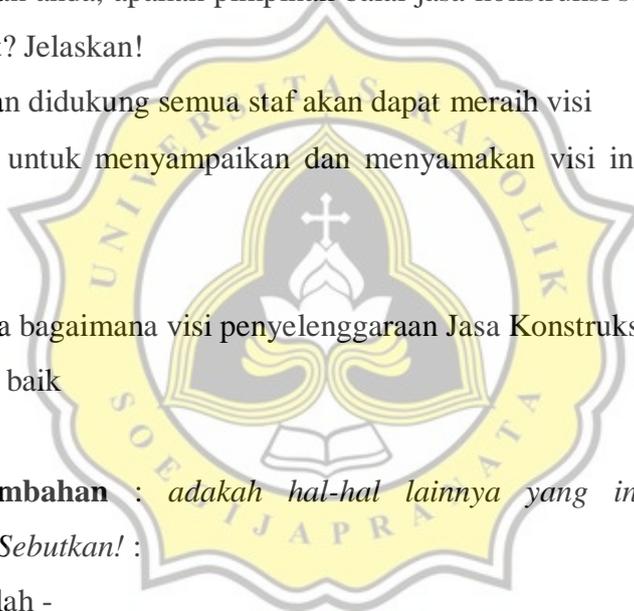
J : Ada

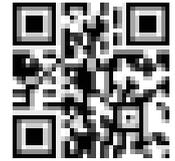
- **P** : Menurut anda bagaimana visi penyelenggaraan Jasa Konstruksi saat ini? Ceritakanlah!

J : Sudah cukup baik

10. **Pertanyaan Tambahan** : *adakah hal-hal lainnya yang ingin disampaikan diluar pertanyaan ini ? Sebutkan!* :

- Kendala/masalah -
- Kendala/masalah -
- Kendala/masalah -
- Kendala/masalah -





9.11% PLAGIARISM
APPROXIMATELY

Report #9881538

BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Kekecewaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah dimasa lalu masih jelas teringat di pikiran kita. Pada masa pergolakan reformasi tahun 1998, salah satu tuntutan kepada pemerintah adalah melakukan reformasi birokrasi. Namun, semangat untuk mereformasi birokrasi saat ini banyak yang masih sebatas konsep dan budaya birokrasi yang cenderung lamban, tidak efektif dan boros anggaran (Haning, 2018). Era reformasi menuntut sistem pemerintahan daerah yang semula bersifat sentralistik (UU No. 5 Tahun 1974) hingga mengalami perubahan dengan dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang bersifat desentralistik. Perubahan sistem pemerintahan ini didasari oleh kewenangan pemerintah pusat yang terlalu besar dan berpotensi tidak dapat menangkap permasalahan daerah dengan baik (Muhammad, 2016). UU No. 23 tahun 2014 memberikan harapan perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah. Perangkat Daerah yang dimaksud adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dimana birokrasi dijalankan. Salah satunya prinsip yang digunakan dalam UU tersebut adalah prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di